

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

BPTP YOGYAKARTA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP YOGYAKARTA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP YOGYAKARTA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

- D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
- E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

- F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
- F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp209.821.106,00 atau mencapai 144,70% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp145.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp13.463.028.076,00 atau mencapai 96,80% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.908.374.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp146.205.228.175,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.911.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp146.184.317.175,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.571.145,00 dan Rp146.175.657.030,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp161.118.550,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp20.952.204.157,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-20.791.085.607,00. Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp145.379.831,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-20.645.705.776,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp153.568.202.984,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-20.645.705.776,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.253.159.822,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp146.175.657.030,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	145.000.000,00	209.821.106,00	144,70	400.192.670,00
Jumlah Pendapatan		145.000.000,00	209.821.106,00	144,70	400.192.670,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	9.015.260.000,00	8.640.135.891,00	95,84	8.786.890.894,00
Belanja Barang	B.4.	4.816.214.000,00	4.745.992.185,00	98,54	10.585.332.452,00
Belanja Modal	B.5.	76.900.000,00	76.900.000,00	100,00	1.541.444.800,00
Jumlah Belanja		13.908.374.000,00	13.463.028.076,00	96,80	20.913.668.146,00

II. NERACA

BPTP YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	0,00	47.148,00
Persediaan	C.1.2.	20.911.000,00	5.655.366.270,00
Jumlah Aset Lancar		20.911.000,00	5.655.413.418,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	124.586.131.002,00	124.586.131.002,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14.295.585.167,00	14.349.485.167,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	20.073.622.859,00	20.023.722.859,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	467.128.000,00	467.128.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	20.923.500,00	20.923.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-13.259.073.353,00	-11.437.636.328,00
Jumlah Aset Tetap		146.184.317.175,00	148.009.754.200,00
Jumlah Aset		146.205.228.175,00	153.665.167.618,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	29.571.145,00	96.964.634,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		29.571.145,00	96.964.634,00
Jumlah Kewajiban		29.571.145,00	96.964.634,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	146.175.657.030,00	153.568.202.984,00
Jumlah Ekuitas		146.175.657.030,00	153.568.202.984,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		146.205.228.175,00	153.665.167.618,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTP YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	161.118.550,00	286.667.400,00
JUMLAH PENDAPATAN		161.118.550,00	286.667.400,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	8.577.185.827,00	8.849.192.725,00
Beban Persediaan	D.3.	2.947.584.650,00	942.958.575,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.424.236.633,00	3.648.187.660,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	544.877.451,00	577.405.415,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	533.523.351,00	2.085.756.295,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	4.022.459.220,00	69.125.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.902.337.025,00	2.104.134.360,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	0,00	-43.750,00
JUMLAH BEBAN		20.952.204.157,00	18.276.716.280,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-20.791.085.607,00	-17.990.048.880,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	48.512.500,00	9.575.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	558.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	99.275.956,00	368.250.970,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	2.408.625,00	52.901.700,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		145.379.831,00	324.366.270,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-20.645.705.776,00	-17.665.682.610,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	153.568.202.984,00	152.669.442.836,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-20.645.705.776,00	-17.665.682.610,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-2.054.245.018,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0,00	-1.101.550.023,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	2.150.985.133,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	-3.103.680.128,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	13.253.159.822,00	20.618.687.776,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	146.175.657.030,00	153.568.202.984,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP YOGYAKARTA

BPTP Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan untuk dapat menghasilkan inovasi teknologi pertanian, kelembagaan dan kebijakan pertanian spesifik lokasi yang diperlukan dalam membangun sector pertanian daerah yang tangguh dan berdaya saing.

BPTP Yogyakarta bertujuan untuk:

- a. Menyusun database dan informasi tentang potensi sumberdaya dan kebutuhan teknologi pertanian dalam rangka penyediaan informasi mutakhir untuk mendukung pengembangan pertanian di wilayah DIY.
- b. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang layak dan sesuai dengan potensi sumberdaya pertanian di wilayah DIY guna mendukung peningkatan ketahanan pangan dan mendorong berkembangnya agribisnis yang kompetitif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah DIY.
- c. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan teknologi pertanian melalui berbagai bentuk media dalam rangka mempercepat alih teknologi inovasi pertanian kepada pengguna serta penyampaian umpan balik bagi penajaman program penelitian pertanian wilayah maupun nasional.
- d. Meningkatkan jalinan lintas institusional yang lebih erat dan pelayanan kerjasama dengan kualitas prima.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pendukung operasional balai dan kualitas sumberdaya manusia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BPTP Yogyakarta berkomitmen dengan visi “Menjadi Institusi Penghasil Inovasi Teknologi Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan. Nilai Tambah, Eksport dan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian “.

PROGRAM UTAMA BPTP YOGYAKARTA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka strategi yang akan ditempuh Balai untuk periode lima tahun ke depan secara rinci dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

Kebijakan

- a. Memberdayakan sumberdaya Balai dan mendukung pemerintah daerah secara optimal.
- b. Menggali dan memanfaatkan sumber – sumber pertumbuhan produksi pertanian daerah.
- c. Memanfaatkan semua media komunikasi dan public figure dalam kegiatan diseminasi.
- d. Memperluas jaringan kerjasama penelitian.
- e. Memperluas kegiatan diseminasi vertical maupun horizontal.
- f. Mengembangkan pola perencanaan yang berorientasi kepada kebutuhan dan preferensi konsumen.

Program Kerja

Program kerja BPTP lima tahun ke depan mengacu pada program utama badan Litbang Pertanian yang memiliki lima program utama dan BBP2TP yang memiliki empat program utama dengan tiga belas sub program. Adapun Program Kerja BPTP untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan Optimalisasi Sumberdaya Pertanian Spesifik Lokasi
2. Pengkajian dan Perakitan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi
3. Pengkajian model pengembangan Teknologi berbasis Permintaan pasar dan preferensi pengguna
4. Analisis kebijakan Pertanian yang bersifat Antisipatif dan Responsif
5. Diseminasi Inovasi Mendukung Program Strategi Deptan Pertanian dan Program Pembangunan Pertanian.
 - a. Pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)
 - b. Pendampingan program Pengembangan Kawasan Hortikultura
 - c. Pendampingan program Percepatan Swasembada daging sapi.
6. Percepatan Penyampaian Perkembangan Inovasi Pertanian
 - a. Percepatan Penyampaian Inovasi Pertanian (Roadshow, Gelar, Open House, Visitor Plot, Pameran dan Gelar Teknologi Tepat Guna serta Forum Komunikasi)
 - b. Pengembangan Diseminasi Parsitipatif (FEATI)
 - c. Pengembangan media informasi Inovasi Pertanian (Media Cetak dan Audio Visual)
7. Pengembangan jaringan Kerjasama Pengkajian dan Diseminasi dengan berbagai Lembaga Nasional dan Internasional.
 - a. PIPKPP/Program Intensif Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa.

8. Komersialisasi Teknologi Badan Litbang Pertanian
9. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga/pengelolaan program, evaluasi, kerjasama dan Instansi Pengkajian.
10. Program Peningkatan kualitas sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta pelayanan dan dokumen administrasi Laboratorium dll.

Dalam tataran praktisnya, BPTP Yogyakarta membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

1. Pengkajian Pengembangan Jogja Seed Center Mendukung Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - a. Kajian Sistem Produksi Benih
2. Pendampingan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)
 - a. Demplot Ternak Sapi Mendukung SL-PTT
 - b. Demplot Peningkatan Produksi Padi Menuju IP 400
 - c. Demplot Pengembangan Tanaman Padi Off Season
 - d. Pelatihan SL-PTT
 - e. Pendampingan SL-PTT
3. Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura
 - a. Demplot Pengembangan Biofarmaka
 - b. Demplot Pengembangan Bunga krisan
 - c. Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura.
4. Pendampingan Program Percepatan Swasembada Daging
 - a. Demplot Peningkatan Produksi Sapi
 - b. Demplot Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
 - c. Pelatihan
 - d. Pendampingan Percepatan Swasembada Daging
5. Informasi IPTEK, Diseminasi dan Jaringan Umpan Balik
 - a. Road Show
 - b. Visitor Plot

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP YOGYAKARTA. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP YOGYAKARTA menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP YOGYAKARTA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP YOGYAKARTA yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP YOGYAKARTA telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	84.000.000,00	84.000.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	53.000.000,00	53.000.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00
Jumlah Pendapatan	145.000.000,00	145.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.858.612.000,00	8.933.612.000,00
Belanja Lembur	81.648.000,00	81.648.000,00
Belanja Barang Operasional	520.200.000,00	858.575.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.852.658.000,00	928.946.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.690.885.000,00	1.247.256.000,00
Belanja Jasa	870.935.000,00	707.866.000,00
Belanja Pemeliharaan	605.330.000,00	539.330.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.835.250.000,00	534.241.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	675.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	27.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	49.900.000,00
Jumlah Belanja	19.140.518.000,00	13.908.374.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp209.821.106,00 atau mencapai 144,70% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp145.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	53.000.000,00	71.508.000,00	134,92
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	84.000.000,00	138.123.050,00	164,43
Pendapatan Jasa Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	190.056,00	0,00
Jumlah	145.000.000,00	209.821.106,00	144,70

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -47,57% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	71.508.000,00	102.700.000,00	-30,37
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	102.840.000,00	-100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	138.123.050,00	189.432.400,00	-27,09
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	4.110.000,00	-100,00
Pendapatan Lain-lain	190.056,00	1.110.270,00	-82,88
Jumlah	209.821.106,00	400.192.670,00	-47,57

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp13.463.028.076,00 atau 96,80% dari anggaran belanja sebesar Rp13.908.374.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	9.015.260.000,00	8.657.396.266,00	96,03
Belanja Barang	4.816.214.000,00	4.745.992.185,00	98,54
Belanja Modal	76.900.000,00	76.900.000,00	100,00
Total Belanja Kotor	13.908.374.000,00	13.480.288.451,00	96,92
Pengembalian Belanja		-17.260.375,00	0,00
Total Belanja	13.908.374.000,00	13.463.028.076,00	96,80

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -35,63% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	8.640.135.891,00	8.786.890.894,00	-1,67
Belanja Barang	4.745.992.185,00	10.585.332.452,00	-55,16
Belanja Modal	76.900.000,00	1.541.444.800,00	-95,01
Total Belanja	13.463.028.076,00	20.913.668.146,00	-35,63

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.640.135.891,00 dan Rp8.786.890.894,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -1,67% dari TA 2019. Hal ini disebabkan adanya beberapa pegawai yang memasuki masa purna tugas.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.575.815.266,00	8.744.174.548,00	-1,93
Belanja Lembur	81.581.000,00	79.808.000,00	2,22
Jumlah Belanja Kotor	8.657.396.266,00	8.823.982.548,00	-1,89
Pengembalian Belanja Pegawai	-17.260.375,00	-37.091.654,00	-53,47
Jumlah Belanja	8.640.135.891,00	8.786.890.894,00	-1,67

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.745.992.185,00 dan Rp10.585.332.452,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -55,16% dari TA 2019.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pemotongan anggaran terkait adanya pandemi covid 19
2. Pada tahun 2020 tidak terdapat alokasi anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	855.686.247,00	508.343.750,00	68,33
Belanja Barang Non Operasional	923.467.680,00	2.461.956.102,00	-62,49
Belanja Barang Persediaan	1.244.498.625,00	2.178.654.275,00	-42,88
Belanja Jasa	649.526.131,00	678.104.315,00	-4,21
Belanja Pemeliharaan	539.290.151,00	577.390.415,00	-6,60
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	533.523.351,00	2.098.482.473,00	-74,58
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	2.095.127.300,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	4.745.992.185,00	10.598.058.630,00	-55,22
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-12.726.178,00	-100,00
Jumlah Belanja	4.745.992.185,00	10.585.332.452,00	-55,16

Pada tahun anggaran 2020 ini terdapat realisasi akun khusus yang peruntukannya untuk penanganan covid 19 yaitu:

- a. Akun 5211131 sebesar Rp. 222.903.000,00 digunakan untuk belanja penambah penambah daya tahan tubuh, vitamin dan madu, perlengkapan penanggulangan covid 19, termogun infrared.
- b. Akun 5218411 sebesar Rp. 197.500.000,00 di gunakan untuk belanja Pembelian masker, hand sanitizer, face shield, paket eucaroll on dan euca inhalant.
- c. Akun 522192 sebesar Rp. 172.105.000,00 digunakan untuk biaya Rapid test dan Swab pegawai BPTP Yogyakarta serta penyemprotan desinfektan lingkungan kantor BPTP Yogyakarta.
- d. Akun 523114 sebesar Rp. 5.000.000,00 digunakan untuk belanja pengadaan tempat cuci tangan.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp76.900.000,00 dan Rp1.541.444.800,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -95,01% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran terkait adanya covid 19. Anggaran untuk belanja modal dialihkan untuk belanja dalam rangka penanganan pandemi covid 19.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	341.310.000,00	-92,09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.900.000,00	1.200.134.800,00	-95,84
Jumlah Belanja Kotor	76.900.000,00	1.541.444.800,00	-95,01
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	76.900.000,00	1.541.444.800,00	-95,01

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp27.000.000,00 dan Rp341.310.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -92,09% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran terkait adanya covid 19. Anggaran untuk belanja modal dialihkan untuk belanja dalam rangka penanganan pandemi covid 19.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	341.310.000,00	-92,09
Jumlah Belanja Kotor	27.000.000,00	341.310.000,00	-92,09
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	27.000.000,00	341.310.000,00	-92,09

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.900.000,00 dan Rp1.200.134.800,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -95,84% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya pemotongan anggaran terkait adanya covid 19. Anggaran untuk belanja modal dialihkan untuk belanja dalam rangka penanganan pandemi covid 19.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.900.000,00	1.200.134.800,00	-95,84
Jumlah Belanja Kotor	49.900.000,00	1.200.134.800,00	-95,84
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	49.900.000,00	1.200.134.800,00	-95,84

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp47.148,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.911.000,00 dan Rp5.655.366.270,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	16.886.000,00	107.204.000,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	3.601.721.270,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	29.620.500,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	381.503.450,00
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00	9.614.000,00
Bahan Baku	4.025.000,00	1.525.703.050,00
Jumlah	20.911.000,00	5.655.366.270,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp124.586.131.002,00 dan Rp124.586.131.002,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.295.585.167,00 dan Rp14.349.485.167,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	14.349.485.167,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	27.000.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan	-80.900.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	14.295.585.167,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-11.617.347.037,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.678.238.130,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. pembelian APAR senilai Rp. 20.000.000,00
2. pembelian finger print senilai Rp. 7.000.000,00
3. Penghapusan dua unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda dua

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.073.622.859,00 dan Rp20.023.722.859,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	20.023.722.859,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	49.900.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	20.073.622.859,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-1.550.560.311,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	18.523.062.548,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa renovasi gedung Laboratorium Tanah.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp467.128.000,00 dan Rp467.128.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.923.500,00 dan Rp20.923.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-13.259.073.353,00 dan Rp-11.437.636.328,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.295.585.167,00	-11.617.347.037,00	2.678.238.130,00
2.	Gedung dan Bangunan	20.073.622.859,00	-1.550.560.311,00	18.523.062.548,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	467.128.000,00	-91.166.005,00	375.961.995,00
4.	Aset Tetap Lainnya	20.923.500,00	0,00	20.923.500,00
Akumulasi Penyusutan		34.857.259.526,00	-13.259.073.353,00	21.598.186.173,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.571.145,00 dan Rp96.964.634,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP YOGYAKARTA per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.865.820,00	64.815.884,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	27.705.325,00	32.148.750,00
Jumlah	29.571.145,00	96.964.634,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp146.175.657.030,00 dan Rp153.568.202.984,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp161.118.550,00 dan Rp286.667.400,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	4.110.000,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.875.000,00	28.500.000,00	-65,35
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	71.508.000,00	102.700.000,00	-30,37
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	68.815.350,00	140.306.700,00	-50,95
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.920.200,00	11.050.700,00	-1,18
Jumlah	161.118.550,00	286.667.400,00	-43,80

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.577.185.827,00 dan Rp8.849.192.725,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.372.087.060,00	5.651.002.880,00	-4,94
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.263,00	70.436,00	-10,18
Beban Tunj. Anak PNS	88.076.190,00	97.758.589,00	-9,90
Beban Tunj. Beras PNS	224.719.260,00	239.130.840,00	-6,03
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.345.850.000,00	1.390.175.000,00	-3,19
Beban Tunj. PPh PNS	86.419.886,00	98.340.286,00	-12,12
Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000,00	32.170.000,00	1,83
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	366.807.218,00	406.358.794,00	-9,73
Beban Tunjangan Umum PNS	117.979.950,00	127.504.900,00	-7,47
Beban Uang Lembur	81.581.000,00	79.808.000,00	2,22
Beban Uang Makan PNS	860.842.000,00	726.873.000,00	18,43
Jumlah	8.577.185.827,00	8.849.192.725,00	-3,07

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.947.584.650,00 dan Rp942.958.575,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	2.171.209.000,00	808.333.225,00	168,60
Beban Persediaan konsumsi	552.114.000,00	103.125.350,00	435,38
Beban persediaan lainnya	224.261.650,00	31.500.000,00	611,94
Jumlah	2.947.584.650,00	942.958.575,00	212,59

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.424.236.633,00 dan Rp3.648.187.660,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	296.179.780,00	917.188.712,00	-67,71
Beban Barang Non Operasional Lainnya	463.337.900,00	1.287.172.390,00	-64,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	222.903.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	168.585.000,00	154.500.000,00	9,12
Beban Honor Output Kegiatan	163.950.000,00	257.595.000,00	-36,35
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	172.105.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	20.000.000,00	169.995.000,00	-88,23

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	464.198.247,00	353.843.750,00	31,19
Beban Langganan Listrik	335.897.137,00	362.580.484,00	-7,36
Beban Langganan Telepon	25.789.069,00	9.619.024,00	168,10
Beban Sewa	91.291.500,00	135.693.300,00	-32,72
Jumlah	2.424.236.633,00	3.648.187.660,00	-33,55

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp544.877.451,00 dan Rp577.405.415,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	341.991.000,00	343.592.065,00	-0,47
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.299.151,00	233.798.350,00	-17,75
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.570.300,00	15.000,00	37.035,33
Beban Persediaan suku cadang	17.000,00	0,00	0,00
Jumlah	544.877.451,00	577.405.415,00	-5,63

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp533.523.351,00 dan Rp2.085.756.295,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	444.483.351,00	1.699.656.829,00	-73,85
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.040.000,00	363.135.000,00	-75,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	22.964.466,00	-100,00
Jumlah	533.523.351,00	2.085.756.295,00	-74,42

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.022.459.220,00 dan Rp69.125.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9.614.000,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	381.503.450,00	0,00	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	29.620.500,00	69.125.000,00	-57,15
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.601.721.270,00	0,00	0,00
Jumlah	4.022.459.220,00	69.125.000,00	5.719,11

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.902.337.025,00 dan Rp2.104.134.360,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	558.985.783,00	523.487.007,00	6,78
Beban Penyusutan Irigasi	12.202.355,00	12.202.356,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.379.762,00	9.732.804,00	-55,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Jaringan	1.115.850,00	1.115.850,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	564.125,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.325.653.275,00	1.557.032.218,00	-14,86
Jumlah	1.902.337.025,00	2.104.134.360,00	-9,59

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-43.750,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-43.750,00	-100,00
Jumlah	0,00	-43.750,00	-100,00

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-558.000,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-2.408.625,00	-52.901.700,00	-95,45
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0,00	94.090.000,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	11.340.900,00	11.175.200,00	1,48
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	87.745.000,00	261.875.500,00	-66,49
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	9.575.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	48.512.500,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	190.056,00	1.110.270,00	-82,88
Jumlah	145.379.831,00	324.366.270,00	-55,18

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp153.568.202.984,00 dan Rp152.669.442.836,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-20.645.705.776,00 dan Rp-17.665.682.610,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2.054.245.018,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.101.550.023,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.150.985.133,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-3.103.680.128,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.253.159.822,00 dan Rp20.618.687.776,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.256.408.076,00
Diterima dari Entitas Lain	-209.821.106,00
Pengesahan Hibah Langsung	206.622.465,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-49.613,00
Jumlah	13.253.159.822,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-209.821.106,00 sedangkan DKEL sebesar Rp13.256.408.076,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp206.622.465,00 dan Rp512.857.412,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah

Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-49.613,00 dan Rp0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	ACIAR	UANG	206.622.465,00
Jumlah Nilai Hibah			206.622.465,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp146.175.657.030,00 dan Rp153.568.202.984,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

I. Entitas Pelapor

- a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat Jalan Stadion Maguwoharjo No. 22 Karang Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
- b. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala dengan kedudukan sebagai Eselon III. Selain Kepala yang menduduki jabatan eselon III, terdapat dua struktural eselon IV yaitu pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pengkajian.
- c. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta sebagai UAKPA/B lingkup Badan Litbang Pertanian, sesuai dengan Permentan No. 41/Permentan OT.140/9/2008 tanggal 4 September 2008, mendapat tugas tambahan yaitu menjadi sekretariat dan koordinator UAPPA/B-W.

II. Selama periode tahun 2020 BPTP Yogyakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak satu kali dengan rincian berikut:

a. DIPA AWAL

Nomor dokumen : DIPA 018.09.2.633975/2019
Tanggal : 12 November 2019
PAGU : Rp. 19.140.158.000,00

b. DIPA REVISI 1

Nomor Dokumen : DIPA 018.09.2.633975/2020 Revisi 1
Tanggal : 27 April 2020
PAGU : Rp. 27.407.706.000,00

c. DIPA REVISI 2

Nomor Dokumen : DIPA 018.09.2.633975/2020 Revisi 2

Tanggal : 22 Juni 2020
PAGU : 13.053.951.000,00

d. DIPA REVISI 3

Nomor Dokumen : DIPA 018.09.2.633975/2020 Revisi 3
Tanggal : 4 September 2020
PAGU : 13.126.751,00

e. DIPA REVISI 4

Nomor Dokumen : DIPA 018.09.2.633975/2020 Revisi 4
Tanggal : 26 Oktober 2020
PAGU : 13.701.751.000,00

f. DIPA REVISI 5

Nomor Dokumen : DIPA 018.09.2.633975/2020 Revisi 5
Tanggal : 3 November 2020
PAGU : 13.908.374.000,00

Dalam revisi ke lima terdapat alokasi anggaran khusus yang peruntukannya untuk penanggulangan covid 19 senilai Rp. 599.891.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Akun 5211131 senilai Rp. 223.300.000 terealisasi senilai Rp. 222.903.000,00 digunakan untuk belanja penambah penambah daya tahan tubuh, vitamin dan madu, perlengkapan penanggulangan covid 19, termogun infrared.
- Akun 5218411 senilai Rp. 199.250.000 terealisasi senilai Rp. 197.500.000,00 di gunakan untuk belanja Pembelian masker, hand sanitizer, face shield, paket eucaroll on dan euca inhalant.
- Akun 522192 senilai Rp. 172.341.000 terealisasi senilai Rp. 172.105.000,00 digunakan untuk biaya Rapid test dan Swab pegawai BPTP Yogyakarta serta penyemprotan desinfektan lingkungan kantor BPTP Yogyakarta.
- Akun 523114 senilai Rp. 5.000.000,00 terelaliasai senilai Rp 5.000.000,00 digunakan untuk belanja pengadaan tempat cuci tangan.

III. BPTP Yogyakarta tahun ini terdapat kerjasama dengan ACIAR yang berlokasi di Desa Bleberan, Playen, Gunung Kidul. Untuk tahun 2020 besarnya dana sebesar Rp. 206.622.465,00 dengan nomor register LPS/2013/021/2HJ9J1NA dan telah dimasukkan dipa tahun 2020. Adapun rincian realisasi belanja Hibah Luar Negeri adalah:

- a. Akun 521211 senilai Rp. 18.977.000,00
- b. Akun 521219 senilai Rp. 48.200.000,00
- c. Akun 521811 senilai Rp. 61.423.000,00
- d. Akun 522141 senilai Rp. 23.400.000,00
- e. Akun 524111 senilai Rp. 54.600.000,00